



RENCANA KERJA PERUBAHAN

DINAS PERDAGANGAN DAN
TRANSMIGRASI TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT, atas Rahmat dan KaruniaNya. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi tahun 2024 merupakan Dokumen tahunan Rencana Kerja yang telah disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi pada tahun 2024.

Rencana Kerja ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan penyesuaian anggaran dalam rangka mewujudkan kinerja pelayanan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi yang lebih optimal.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi tahun 2024 merupakan acuan dalam penyusunan RKA Dinas Perdagangan dan Transmigrasi setelah memerhatikan nota kesepakatan kebijakan umum APBD (KUA) serta prioritas dan plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Kami menyadari atas kekurangan dan keterbatasan kami, sehingga dalam penyusunan Rencana Kerja OPD (Renja OPD) Dinas Perdagangan dan Transmigrasi mungkin masih terdapat kelemahan, maka kami harapkan koreksi dan masukan penyempurnaan lebih lanjut agar dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan dibidang Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi demi terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah

Painan, Agustus 2024

Plt KEPALA DINAS
PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
KAB. PESISIR SELATAN



HI. NURMAILISTRY, SH
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 196705031995032002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika	9
Bab. II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Dinas Perdagangan Dan Transmigrasi Hingga Triwulan II Tahun 2024	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Renstra Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2024	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	29
2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan	32
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	35
Bab III Tujuan Dan Sasaran Dinas Perdagangan Dan Transmigrasi	55
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	55
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	56
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	58
Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas Perdagangan Dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan	80
Bab V Penutup	83

DAFTAR TABEL

Tabel .2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024 Kabupaten Pesisir Selatan	14
Tabel .2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan	30
Tabel.2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2024 Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan	36
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	59
Tabel 4.1	Rencana Program/Kegiatan dan Pendanaan Renja Perubahan Tahun 2024 Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sesuai tugas dan fungsinya. Dinas Perdagangan dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Perdagangan, perindustrian dan Transmigrasi sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 138 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi yang kemudian diubah dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi yang telah mencakup uraian tugas Jabatan Fungsional hasil penyetaraan dalam rangka Reformasi Birokrasi.

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan tahapan kegiatan yang melibatkan unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan daerah/wilayah dalam waktu tertentu.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah dengan prinsip-prinsip, meliputi:

- a. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional
- b. Dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing
- c. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah
- d. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Rencana pembangunan Daerah, terdiri atas :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

sedangkan Rencana Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen pembangunan daerah di setiap organisasi perangkat daerah, yang disusun setiap tahun perencanaan. Rencana perangkat daerah terdiri atas :

1. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah
2. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

1.1.1 Pengertian Renja

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan adanya RENJA ini, diharapkan sektor Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi di Kabupaten Pesisir Selatan dapat

berperan secara optimal sebagai fasilitator dan katalisator dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD tahun berkenaan. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD Perubahan, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan. Prinsip Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2024 adalah :

1. Substansi Renja Perubahan merupakan materi Rancangan Perubahan Renja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2024;
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan;
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.

4. Renja Perubahan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi merupakan dokumen resmi program dan kegiatan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi yang dilaksanakan dalam tahun 2024;
5. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi tahun 2024 merupakan acuan dalam penyusunan RKA Perubahan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi setelah memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya.

Rencana Kerja OPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja adalah penjabaran dari Renstra OPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya mulai dari dokumen RKPD, Renstra Dinas Perdagangan dan Transmigrasi tahun 2021-2026, Renja Kementerian dan Lembaga terkait dengan Perindustrian, Perdagangan dan Transmigrasi, serta Renja Provinsi Sumatera Barat.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jls Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir

Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 185 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2021-2026
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RENJA Perubahan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 adalah untuk :

- a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. Bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

Tujuan penyusunan RENJA Perubahan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 adalah untuk memetakan ulang kebutuhan berbagai sumber di sektor perdagangan, perindustrian dan transmigrasi dalam tahun berjalan secara jelas dan transparan yang akan digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan tujuan pembangunan di sektor perdagangan, perindustrian dan transmigrasi serta mempermudah melaksanakan kegiatan sehingga sumber-sumber daya yang ada di masyarakat dapat dikelola secara baik, lebih efektif, efisien dan optimal.

1.4 Sistematika

Sistematika penyusunan dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Hingga Triwulan II Tahun 2024

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Renstra Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2024

- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
- 2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan Dan Transmigrasi

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
- 3.3.. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas Perdagangan Dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan

BAB V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI HINGGA TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian RENSTRA Dinas Perdagangan dan Transmigrasi pada Tahun 2024

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja dilakukan dengan melakukan pengukuran kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran dengan menggunakan indikator masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome).

Pengukuran Kinerja Kegiatan didasarkan pada target kinerja yang disusun pada awal tahun anggaran. Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024 mengacu capaian triwulan II tahun 2024. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2023 dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan realisasi APBD Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana terlampir pada tabel 2.1.

Secara umum, garis besar pokok materi yang disampaikan pada tabel 2.1 adalah sebagai berikut :

1. Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah dihitung hingga triwulan II tahun 2024. Capaian indikator program pada Dinas Perdagangan dan Transmigrasi bervariasi dan masih ada yang dibawah 50%. Capaian indikator program terendah yaitu Peningkatan jumlah omset komoditi dan produk unggulan daerah dengan capaian 33,8%.

Pada tahun 2024, focus pengembangan komoditi unggulan dan orientasi ekspor masih kurang. Pemerintah lebih focus pada fasilitasi sarana distribusi yaitu pengelolaan dan rehab pasar. Pengembangan produk unggulan lebih difokuskan pada bidang Perindustrian melalui program sertifikasi TKDN dengan output ke Implementasi rencana induk Pembangunan industri, bukan jumlah omset produk.

Capaian terendah berikutnya yaitu Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (%) dengan capaian 44,31%. Rendahnya capaian ini disebabkan fluktuasi harga bahan pokok yang cukup tinggi sebagai dampak inflasi pada semester 2 (dua) tahun 2023, hingga triwulan II tahun 2024 ini. Keadaan ini diperparah oleh dampak elnino yang berpengaruh pada harga bahan pokok di Kabupaten Pesisir Selatan

2. Pada tahun 2024 Program dan kegiatan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi difokuskan pada penanganan inflasi, kemiskinan, penerapan TKDN, operasional sentra IKM dan pengamanan aset baik itu berupa aset pasar, sentra IKM maupun SHM transmigrasi
3. Hasil evaluasi hingga triwulan II tahun 2024 menjadi bahan pertimbangan kebijakan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi dalam penyusunan Renja Perubahan tahun 2024. Poin evaluasi yang paling utama adalah rendahnya serapan PAD dari retribusi pasar yang disebabkan berkurangnya semangat petugas pengelola pasar. Ketidaklancaran pembayaran kesejahteraan petugas pengelola pasar menjadi penyebab utama macetnya setoran retribusi pasar. Hal ini

disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang membatasi pembayaran honorarium non ASN yang tidak terdaftar BKN secara langsung dari dana APBD. Untuk itu pada RAPBD perubahan tahun 2024 dilakukan usulan pembayaran honorarium petugas pasar melalui pihak ketiga/ outsourcing .

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024
Kabupaten Pesisir Selatan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) hingga Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2023			Realisasi Renja Perangkat Daerah TW II tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realiasi capaian program dan kegiatan s/d TW II tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6	7	8 (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN											
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kelengkapan Pelaporan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	60%	21.679.459.252	20%	9.189.308.639	20%	24%	118%	14%	58%	96,0%

1	2	3	4		5		6	7	8 (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)
		Persen Ketepatan waktu pelaporan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	60%		20%		20%	20%	100%	10%	50%	83,3%
		Persentase Kinerja Bidang yang tercapai	57%		20%		19%	21%	110,5%	11%	52%	91,2%
		Jumlah Inovasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	12		5		3	1	33	0	6	50,0%
		Kategori keterbukaan informasi publik	95		0		95	24	25	0	24	25,3%
	Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang dilaporkan	48 dokumen	17.953.995.129	24 dokumen	7.755.018.114	12 dokumen	13 dokumen	108	7	44	91,7%
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang. Bulan)	1664 orang	17.371.190.939	912 orang	7.482.724.432	456 orang	416 orang	91	168	1496	89,9%
	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 dokumen	582.804.190	16 dokumen	272.293.682	12 dokumen	17 dokumen	142	9	42	87,5%

1	2	3	4		5		6	7	8 (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)
1	Administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah pengaduan/saran yang ditindaklanjuti	60	794.662.601	NA	513.546.508	15	0	0	0	-	0%
		Persentase dokumen publik dan dipublish	58%		12%		19%	3%	15,79%	2,42%	17,42%	30,2%
		Jumlah SDM yang mengikuti peningkatan kapasitas (orang)	10		3		5	5	100	5	13	130,0%
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 paket	20.328.856	2 paket	21.336.900	1 paket	1 paket	100	0	3	75,0%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6 paket	174.442.715	6 paket	70.676.136	3 paket	3 paket	100	2	11	183,3%
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	16 paket	82.281.761	16 paket	45.589.220	8 paket	8 paket	100	4	28	175,0%
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	108 eksemplar	26.923.500	72 eksemplar	28.238.020	36 eksemplar	-	-	0	72	66,7%
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	-	0		0	0		0	-	0,0%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	0	-	0		0	0		0	-	0,0%

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024

1	2	3	4		5		6	7	8 (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 laporan	52.702.120	24 laporan	42.985.400	12 laporan	12 laporan	100	0	36	100%
1	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	280 laporan	437.983.650	500 laporan	304.720.832	80 laporan	80 laporan	100	50	630	225%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jumlah pelayanan umum yang terselenggara dengan baik pada Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	57%	1.081.366.374	19%	441.333.014	19%	19%	100%	10 %	48%	84,2%
	Penyediaan jasa Komunikasi ,sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	704.213.104	24 laporan	285.911.714	12 laporan	12 laporan	100	6	42	117%
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 laporan	377.153.270	24 laporan	155.421.300	12 laporan	12 laporan	100	6	42	117%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	54%	1.221.688.733	18%	448.405.058	18%	18%	100%	10 %	46%	85%
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	230.000.000	1		1	1	100	1	3	300%
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	313.781.358	4 unit	172.863.258	8 unit	4 unit	50	3	11	73%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	68 unit	39.423.375	44 unit	18.265.000	14 unit	6 unit	42,86	0	50	74%
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	10 unit	868.484.000	4 unit	257.276.800	4 unit	4 unit	100	4	12	120%

1	2	3	4		5		6	7	8 (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara/ direhab	0 unit	-	0		0	0	0	0	0	0%
1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	80 dokumen	280.000.000	26 dokumen	-	30 dokumen	34 dokumen	113,33	14	74	93%
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56 laporan	130.000.000	0	-	23 laporan	23 laporan	460	8	31	55%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24 dokumen	150.000.000	0	-	15 dokumen	11 dokumen	73,33	6	17	71%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diinventarisasi	2074 unit	117.746.415	300 unit	31.006.000	0	9	0	7	316	15%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	-	0	-	0	0	0	0	0	0%
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 dokumen	20.000.000	0	-	0	0	100	0	0	0%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	54%	97.746.415	0%	31.006.000	36%	36%	100%	9%	45%	83,3%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	10 unit	97.746.415	4	31.006.000	5	1	100	0	5	50%

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024

1	2	3	4		5		6	7	8 (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (%)	<9%	764.916.761	8,89%	103.088.250	0,01	10,54%	10,54	-0,25%	5,02%	44,31
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tk Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	11%	257.314.084	3,79%	39.456.250	3%	5,7%	2	0	9,49%	88%
	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	8 dokumen	110.966.500	2 dokumen	1.947.250	0 dokumen	0	0	0	2	25%
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	8 laporan	146.347.584	2 laporan	37.509.000	0	0	0	0	2	25%
	Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota	Persentase rata rata ketersediaan stock bahan kebutuhan pokok dipasar rakyat dan bahan kebutuhan penting lainnya	54%	379.713.823	0%	23.173.000	18%	18,41%	102%	-0,20%	18,21%	34%
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 laporan	116.373.375	1 laporan	1.000.000	0 laporan	0 laporan	-	6	7	58%
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1(satu) Kabupaten / Kota.	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	12 laporan	263.340.448	2 laporan	22.173.000	3 laporan	1 laporan	33	2	5	42%
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tk Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rata rata ketersediaan stock bahan kebutuhan pokok dipasar rakyat dan bahan kebutuhan penting lainnya	54%	127.888.855	0,00%	40.459.000	18%	18,41%	102%	-0,20%	18,21%	34%
	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tk Agen dan Pasar Rakyat.	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	8 laporan	127.888.855	1 laporan	40.459.000	1 laporan	1 laporan	100	0	2	25%

1	2	3	4		5		6	7	8 (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)
	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah Pasar Rakyat menuju kriteria SNI	2 pasar	1.585.559.684	1 pasar	-	2 pasar	1 pasar	50	1 pasar	1 pasar	50%
	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapan Lainnya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	0,30%	1.585.559.684	0,40%	-	0,0%	0,020%	100%	0,30%	0,724%	241%
	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	2520 UTTP	1.543.294.890	420 UTTP	443.976.401	250 UTTP	250 UTTP	100,00	316	986	39%
	Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	1700 pelaku usaha	180.000.000	0		0	0	-	80	80	5%
1	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Peningkatan jumlah omset komoditi dan produk unggulan daerah	8%	1.405.559.684	0,00%	-	2%	2%	100	0,70%	2,7%	33,8%
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran, dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah produk dan komoditi yang difasilitasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	60 komoditi	1.405.559.684	20 komoditi	-	20 komoditi	0	0	0	20	33%
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri ditingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	40 UMKM	1.017.056.250	0	-	10 UMKM	0	-	0	0	0%

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024

1	2	3	4		5		6	7	8 (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	100 UMKM	339.018.750	0	-	0	0	-	0	0	0%
	Peningkatan sistem jaringan dan jaringan informasi perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	4 database	49.484.684	1 database	46.269.450	1 database	1 database	100	0	2	50%
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Peningkatan jumlah omset komoditi dan produk unggulan daerah	8%	205.000.000	0,00%	-	2%	2%	100%	0,70%	2,70%	33,8%
	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis produk dan komoditi potensial ekspor	20 produk	205.000.000	0	-	5 produk	-	0	0	0	0%
	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	10 pelaku usaha	307.500.000	0	-	0	-	-	0	0	0%
	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	12 pelaku usaha	205.000.000	0	-	-	0	0	0	0	0%
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Pasar Rakyat menuju kriteria SNI	2 Pasar	-	1 pasar	-	2 pasar	1 pasar	50	1	1	50%

1	2	3	4		5		6	7	8 (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)
	Pembangunan dan Pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah Pasar Rakyat	51 pasar	3.950.000.000	50 pasar	2.546.363.800	50 pasar	50 pasar	100	0	100	196%
		Jumlah Pedagang di Pasar Rakyat (Yang menempati Petak)	935 pedagang		895 pedagang		915 pedagang	915 pedagang	100	12	927	99%
	Penyediaan sarana Distribusi perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	51 unit	3.950.000.000	50 unit	2.546.363.800	50 unit	50 unit	100	0	50	98%
		Jumlah pasar rakyat yang dibangun / direvitalisasi	6 pasar		5 pasar		1 pasar	2 pasar	200	0	7	117%
1	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pasar Rakyat	51 pasar	2.553.042.625	50 pasar	1.116.594.300	50 pasar	50 pasar	100,00%	0	50	0,98%
		Jumlah Pedagang di Pasar Rakyat (Yang menempati Petak)	935 pedagang		895 pedagang		915 pedagang	915 pedagang	100,00%	12	927	99%
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	44 dokumen	2.553.042.625	23 dokumen	1.116.594.300	12 dokumen	12 dokumen	100	0	35	80%
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai dengan Ketentuan (Pasar rakyat, Toko Swalayan, Waralaba)	60,00%	-	NA	-	57%	0,0%	0,0%	100%	100%	167%

1	2	3	4		5		6	7	8 (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)
1	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Izin Usaha Perdagangan (Pasar rakyat, Pusat perbelanjaan, waralaba, Tanda Daftar Gudang, Surat Keterangan Asal)	22 izin	128.307.630	NA	-	6 izin	0	0	15	15	68%
1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik	4 rekomendasi	94.300.000	NA	-	5 rekomendasi	0	0	0	0	0%
	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/ perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/ perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	16 laporan	34.007.630	0	-	1 laporan	0	0	0	0	0%
	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pemantauan dan pengawasan terhadap distribusi produk dan bahan beresiko dan berbahaya	20 kali	51.250.000	0	-	0	0	0	0	0	0%
	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	12 laporan	51.250.000	0	-	3 izin	0	0	0	0	0%
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIN yang ditetapkan dalam RPIK	18%	-	52,46%	-	5%	2,59%	52%	8,83%	63,88%	355%
	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri	21321 orang		13797 orang		19541 orang	14459 orang	74	200	14659	69%

1	2	3	4		5		6	7	8 (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)
1		Pertambahan jumlah IKM	9%	53.179.937.057	13,44%	30.169.810.322	8,0%	1,3%	0	1,55%	16,32%	181%
		Jumlah Sentra IKM	3 unit		1		2	2	100	0	3	100%
		Jumlah Produk yang bersertifikat (Halal, TKDN, MD-BPOM, HCCP/CPPOB, HKI, SNI) (produk)	235 produk		27		160	102	63,75	0	129	55%
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	1 dokumen	25.000.000	0	-	0	0	0	0	1	100%
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	25 dokumen	822.235.931	5	169.232.500	6	6	100	1	12	48%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	12 dokumen	2.106.600.000	2	51.904.000	1	2	200	0	4	33%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	48 dokumen	50.251.101.126	4	29.948.673.822	12	12	100	1	17	35%
	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri										
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pelaku IKM yang memperoleh Izin sesuai ketentuan (IUI/ NIB)	9,12%	-	20,71%	-	3%	4,59%	155%	16,53%	41,83%	459%

1	2	3	4		5		6	7	8 (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%	615.131.62 2	18,06 %	125.244.50 0	100%	9,10%	0	10%	37,16%	37%
	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	24 dokumen	120.278.50 0	122	51.591.450	12 dokumen	3 dokumen	25,0	10	135	563%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	16 dokumen	55.250.000	1		0	0	0	2	3	19%

1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)	2	3
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIN yang ditetapkan dalam RPIK	18,0%	559.881.622	52,46%	125.244.500	5%	2,59%	52%	8,83%	63,9%	355%
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Tersedianya Informasi Industri secara lengkap dan terkini	100%	559.881.622	0%	125.244.500	100,0%	65%	65%	8%	73%	73,00%
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	60 dokumen	252.381.622	2 dokumen	125.244.500	1 dokumen	1 dokumen	100	2	5	8%
	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/ Kota Melalui SIINas	15 dokumen	307.500.000	0		15	0	0	0	0	0%

1	2	3	4		5		6	7	8 (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)
	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	1 kawasan	145.000.000	0	-	0	0	0	0	0	0%
	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Luas tanah yang dicadangkan untuk pembangunan kawasan transmigrasi	500 hektar	95.000.000	0	-	0	-	0	0	0	0%
		Fasilitasi HPK menjadi APL ntuk Transmigrasi lokal (Hektar)	0		0		-	0	0	0	0	0%
	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa ibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	1 dokumen	45.000.000	0	-	0	0	0	0	0	0%
	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	1 kasus	50.000.000	0	-	0	0	0	0	0	0%
	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	500 hektar	50.000.000	0	-	0	0	0	0	0	0%
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	1 pemukiman	-	0	-	0	0	0	0	0	0%
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah permukiman yang ditata	1 pemukiman	-	0	-	0	0	0	0	0	0%
		Jumlah KK di pemukiman baru	200 KK		0		0	0	0	0	0	0%
	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	1 laporan	30.000.000	0	-	0	0	0	0	0	0%

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024

1	2	3	4		5		6	7	8 (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)
1	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	0 transmigran	0		-	0		0	0	0	0%
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah lembaga di kawasan transmigrasi	50 lembaga	-	48	-	49	48	97,96	0	48	96%
		Jumlah sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi	45 unit		43		44	43	97,7	0	43	96%
	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun (fasilitasi SHM)	4 unit	4.900.499.539	2	2.759.721.156	1	0	0	3	5	125%
		Jumlah satuan pemukiman yang dibina	2 pemukiman		3		1	1	100	2	2	100%
	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	80 KK	725.499.647	20	134.383.350	60	0	0	5	25	31%
	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	2 satuan pemukiman	4.174.999.892	2	2.625.337.806	2	2	100	2	2	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi

Dinas Perdagangan dan Transmigrasi merupakan OPD yang menjalankan fungsi Urusan Pemerintah Pilihan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan bidang Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi. Namun demikian, dalam menjalankan fungsinya, Dinas Perdagangan dan Transmigrasi merupakan OPD kunci dalam penyelenggaraan urusan yang berkaitan dengan Perekonomian Daerah yang terlihat pada kontribusi sektor Industri dan sektor Perdagangan yang cukup besar terhadap PDRB. Sehubungan dengan ini, penyelenggaraan fungsi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi tahun 2021-2026 diarahkan pada pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi didasarkan pada target kinerja yang disusun pada awal tahun anggaran terhadap masing-masing Indikator Kinerja Kunci (IKK) RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, yang menjadi ruang lingkup Dinas Perdagangan dan Transmigrasi. Review terhadap hasil capaian kinerja pelayanan IKK Dinas Perdagangan dan Transmigrasi tahun lalu ($n-2$) dan proyeksi capaian tahun berjalan (tahun $n-1$), tahun n dan tahun $n+1$ mengacu pada target IKK yang terdapat pada Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2021-2026. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan tahun serta proyeksi tahun yang akan datang dapat dilihat pada tabel 2.2 :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
Kabupaten Pesisir Selatan

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	
				(TH N-2)	(TH N-1)	(TH N)	(TH N+1)	(TH N-2)	(TH N-1)	(TH N)	(TH N+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pertambahan jumlah Industri Kecil dan Menengah		√	5,00%	8,00%	9,00%	9,00%	28,15%	8,00%	9,00%	9,00%	
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIN yang ditetapkan dalam RPIK		√	20,00%	25,00%	30,00%	35,00%	52,46%	25,00%	30,00%	35,00%	
3	Persentase hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait		√	100%	100%	100%	100%	28,45%	100%	100%	100%	
4	Tersedianya Informasi Industri secara lengkap dan terkini		√	100%	100%	100%	100%	65%	100%	100%	100%	

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai dengan Ketentuan (IUPP / SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM / IUTS / SIUP Toko Swalayan)		√	55%	57%	60%	60%	NA	57%	60%	60%	
6	Persentase kinerja realisasi pupuk (%)		√	16,2%	17,0%	18,0%	19,0%	18,97%	17,0%	18,0%	19,0%	
7	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapan Lainnya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku		√	0,45%	0,48%	0,50%	0,53%	0,32%	0,48%	0,50%	0,53%	
8	Jumlah lembaga ekonomi dan sosial di kawasan transmigrasi		√	48 lembaga	49 lembaga	50 lembaga	51 lembaga	48 lembaga	49 lembaga	50 lembaga	51 lembaga	

2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan dapat ditentukan beberapa isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan antara lain :

1. Peningkatan omset perdagangan komoditi daerah

Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB Kabupaten Pesisir Selatan dipengaruhi oleh aktifitas perdagangan dalam negeri. Untuk mendorong pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB diperlukan peningkatan omset pelaku usaha perdagangan dalam negeri. Saat ini permasalahan yang dihadapi pelaku usaha perdagangan dalam negeri antara lain :

- a. Keterbatasan akses pasar dan jaringan pemasaran;
- b. Sarana dan prasarana perdagangan masih kurang;
- c. Rendahnya kapasitas SDM pelaku usaha perdagangan yang meliputi :
Kewirausahaan, motivasi dan manajemen bisnis
- d. Inflasi yang menyentuh semua lini sektor usaha

Berbagai aktivitas Dinas Perdagangan dan Transmigrasi dalam rangka peningkatan perdagangan dalam negeri perlu dilakukan antara lain:

- a. Pemasaran produk
- b. Rehab dan peningkatan sarana perdagangan
- c. Pembinaan pelaku usaha perdagangan dalam negeri
- d. Pembinaan dan pengawasan serta koordinasi pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga

- e. Menjamin ketersediaan dan stabilitas harga bahan kebutuhan pokok dan barang penting.
- f. Mendorong promosi dan jejaring pemasaran serta penggunaan produk-produk lokal melalui partisipasi aktif dalam program/ kebijakan nasional mengenai TKDN dan P3DN
- g. Upaya penanggulangan inflasi dengan melalui kegiatan operasi pasar (penanggulangan jangka pendek), pemantauan harga dan pengendalian ketersediaan bahan pokok (penanggulangan jangka menengah dan panjang)

2. Peningkatan nilai tambah produk IKM

Daya saing produk IKM Kabupaten Pesisir Selatan dapat dikatakan cukup rendah dibandingkan dengan produk IKM kabupaten lain di Sumatera barat, hal ini terlihat belum banyaknya produk IKM yang menembus pasar dalam negeri, luar negeri. Salah satu yang menjadi penyebabnya adalah rendahnya kualitas produk terutama produk pangan, kerajinan rotan, kerajinan kulit dan tas, sulaman dan bordir dan lainnya. Produk yang berkualitas dan berdaya saing dapat dicapai dengan perbaikan proses produksi, yang pada akhirnya meningkatkan nilai tambah industri.

Dalam rangka peningkatan nilai tambah tersebut, pemerintah daerah menfokuskan pembinaan pada sektor unggulan terutama yang telah dirancang dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK). Dalam hal ini, upaya yang dilakukan yaitu melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan :

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pelatihan teknis dan manajemen, standarisasi dan sertifikasi produk IKM, serta membangun kemitraan dengan swasta/ BUMN/BUMD, lembaga pengujian dan desain produk serta perguruan tinggi. ,
2. Penyediaan sarana dan prasarana melalui bantuan peralatan produksi pada kelompok IKM potensial,
3. Pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat melalui pemberdayaan kelompok-kelompok IKM melalui fasilitasi pembangunan sentra IKM unggulan
4. Mendorong tumbuh dan berkembangnya produksi produk lokal unggulan dalam rangka mewujudkan program nasional TKDN dan P3DN.

3. Kemandirian Lembaga dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi

Kemandirian lembaga dan infrastruktur kawasan transmigrasi di Kabupaten Pesisir Selatan ditentukan oleh 2 (dua) hal yaitu :

1. Jumlah lembaga ekonomi, sosial dan budaya yang aktif dan mandiri secara finansial di Kawasan transmigrasi
2. Jumlah sarana prasarana pendukung aktivitas perekonomian masyarakat transmigrasi.

Untuk mewujudkan kemandirian ini diperlukan sinergitas beberapa aspek. Namun dalam perkembangannya, terdapat beberapa kendala yang ditemui antara lain : Belum optimalnya kinerja lembaga masyarakat di kawasan transmigrasi

- a. Belum optimalnya pengelolaan Kota Terpadu Mandiri (KTM)

Lunang Silaut.

- b. Masih kurangnya pengelolaan dan pengembangan bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, kelautan, perikanan dan perkebunan di kawasan transmigrasi
 - c. Masih kurangnya pemahaman masyarakat transmigran terhadap peduli lingkungan terutama untuk menjaga hutan lindung dan lahan gambut
3. Kurangnya pemanfaatan sarana, prasarana/ infrastruktur di kawasan transmigrasi

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, indikator dan target capaian serta pagu indikatif untuk masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan. Analisa terhadap rancangan awal Perubahan RKPD 2024 dilakukan dalam rangka menelaah kebutuhan program, kegiatan, subkegiatan serta pagu indikatif berdasarkan efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan untuk kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi tahun 2024. Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2024 Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2024
Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SEKRETARIAT					SEKRETARIAT					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Kelengkapan Pelaporan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	100 persen	4.654.993.532	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Kelengkapan Pelaporan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	100 persen	4.654.993.532	
			Ketepatan waktu pelaporan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	0 delay laporan				Ketepatan waktu pelaporan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	0 delay laporan		
			Persentase Kinerja Bidang yang tercapai	95 persen				Persentase Kinerja Bidang yang tercapai	95 persen		
			Jumlah Inovasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	3 inovasi				Jumlah Inovasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	3 inovasi		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kategori keterbukaan informasi publik	95				Kategori keterbukaan informasi publik	95		
	Administrasi keuangan perangkat daerah		Jumlah Dokumen Keuangan yang dilaporkan	12 dokumen	3.799.169.694	Administrasi keuangan perangkat daerah		Jumlah Dokumen Keuangan yang dilaporkan	12 dokumen	3.799.169.694	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang. Bulan)	456 orang. Bulan	3.590.278.960	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang. Bulan)	456 orang. Bulan	3.590.278.960	
	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8 dokumen	208.890.734	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8 dokumen	208.890.734	
	Administrasi umum Perangkat Daerah		Jumlah pengaduan/saran yang ditindaklanjuti	15 pengaduan	144.199.388	Administrasi umum Perangkat Daerah		Jumlah pengaduan/saran yang ditindaklanjuti	15 pengaduan	144.199.388	
			Persentase dokumen publik dan dipublish	96 persen				Persentase dokumen publik dan dipublish	96 persen		
			Jumlah SDM yang mengikuti peningkatan kapasitas (orang)	5 orang				Jumlah SDM yang mengikuti peningkatan kapasitas (orang)	5 orang		
	Penyediaan komponen instalasi listerik/ penerangan bangunan kantor	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	2.777.720	Penyediaan komponen instalasi listerik/ penerangan bangunan kantor	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	2.777.720	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3	17.414.124	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3	17.414.124	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	8	9.999.944	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	8	9.999.944	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36	-	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36	-	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	-	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	-	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	0	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	0	-	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	-	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90	114.007.600	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90	114.007.600	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase jumlah pelayanan umum yang terselenggara dengan baik pada Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	95	452.395.556	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase jumlah pelayanan umum yang terselenggara dengan baik pada Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	95	452.395.556	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan jasa Komunikasi ,sumber daya air dan listrik	IV Jurai, Koto XI Tarusan, Lunang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	350.333.135	Penyediaan jasa Komunikasi ,sumber daya air dan listrik	IV Jurai, Koto XI Tarusan, Lunang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	350.333.135	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	IV Jurai, Koto XI Tarusan, Lunang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	102.062.421	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	IV Jurai, Koto XI Tarusan, Lunang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	102.062.421	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	90	176.688.580	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	90	176.688.580	
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional jabatan	Pesisir Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	61.690.000	Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional jabatan	Pesisir Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	61.690.000	
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Pesisir Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	40.048.580	Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Pesisir Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	40.048.580	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	24	2.950.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	24	2.950.000	
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung Kantor dan bangunan lainnya	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	2	72.000.000	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung Kantor dan bangunan lainnya	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	2	72.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara/direhab	0	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara/direhab	0	-	
	Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	20	33.684.200	Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	20	33.684.200	
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14	15.348.200	Evaluasi kinerja perangkat daerah	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14	15.348.200	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	18.336.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	18.336.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah yang diinventarisasi	10	19.999.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah yang diinventarisasi	10	19.999.000	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	19.999.000	Pengamanan Barang Milik Daerah	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	19.999.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	30	-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	30	-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	90	28.857.114	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	90	28.857.114	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	6	28.857.114	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	6	28.857.114	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (%)	<9	29.499.610	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (%)	<9	29.499.610	
3	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tk Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	18	-	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tk Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	18	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	0	-	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	0	-	
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	0	-	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	0	-	
	Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota		Persentase rata rata ketersediaan stock bahan kebutuhan pokok dipasar rakyat dan bahan kebutuhan penting lainnya	90	29.499.610	Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota		Persentase rata rata ketersediaan stock bahan kebutuhan pokok dipasar rakyat dan bahan kebutuhan penting lainnya	90	29.499.610	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12	9.499.660	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12	9.499.660	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1(satu) Kabupaten / Kota.	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2	19.999.950	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1(satu) Kabupaten / Kota.	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2	19.999.950	
	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Jumlah Pasar Rakyat menuju kriteria SNI	2 pasar	285.056.097	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Jumlah Pasar Rakyat menuju kriteria SNI	2 pasar	285.056.097	
	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapan Lainnya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	1	285.056.097	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapan Lainnya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	1	285.056.097	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang	Pesisir Selatan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1500	285.056.097	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang	Pesisir Selatan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1500	285.056.097	
	Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	Pesisir Selatan	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	0	-	Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	Pesisir Selatan	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	0	-	
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Peningkatan jumlah omset komoditi dan produk unggulan daerah	2	-	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Peningkatan jumlah omset komoditi dan produk unggulan daerah	2	-	
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran, dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah produk dan komoditi yang difasilitasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	20	-	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran, dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah produk dan komoditi yang difasilitasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	20	-	
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri ditingkat Kabupaten/Kota	Pesisir Selatan	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	10	-	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri ditingkat Kabupaten/Kota	Pesisir Selatan	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	10	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pesisir Selatan	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	10	-	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pesisir Selatan	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	10	-	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Peningkatan jumlah omset komoditi dan produk unggulan daerah	2	-	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Peningkatan jumlah omset komoditi dan produk unggulan daerah	2	-	
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan misi dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah jenis produk dan komoditi potensial ekspor	5	-	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan misi dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah jenis produk dan komoditi potensial ekspor	5	-	
	Pameran Dagang Nasional	Pesisir Selatan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	0	-	Pameran Dagang Nasional	Pesisir Selatan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	0	-	

1	2	3	4	0	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Pesisir Selatan	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	5 produk	-	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Pesisir Selatan	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	5 produk	-	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Jumlah Pasar Rakyat menuju kriteria SNI	2	1.220.675.048	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Jumlah Pasar Rakyat menuju kriteria SNI	2	1.220.675.048	
	Pembangunan dan Pengelolaan sarana distribusi perdagangan		Jumlah Pasar Rakyat	51	504.574.844	Pembangunan dan Pengelolaan sarana distribusi perdagangan		Jumlah Pasar Rakyat	51	504.574.844	
			Jumlah Pedagang di Pasar Rakyat (Yang menempati Petak)	935				Jumlah Pedagang di Pasar Rakyat (Yang menempati Petak)	935		
	Penyediaan sarana Distribusi perdagangan	Pesisir Selatan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	51	504.574.844	Penyediaan sarana Distribusi perdagangan	Pesisir Selatan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	51	504.574.844	
			Jumlah pasar rakyat yang dibangun /direvitalisasi	3				Jumlah pasar rakyat yang dibangun /direvitalisasi	3		
	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Jumlah Pasar Rakyat	51	716.100.204	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Jumlah Pasar Rakyat	51	716.100.204	
			Jumlah Pedagang di Pasar Rakyat (Yang menempati Petak)	935				Jumlah Pedagang di Pasar Rakyat (Yang menempati Petak)	935		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	11	716.100.204	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	11	716.100.204	
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai dengan Ketentuan (Pasar rakyat, Toko Swalayan, Waralaba)	60	34.007.630	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai dengan Ketentuan (Pasar rakyat, Toko Swalayan, Waralaba)	60	34.007.630	
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Jumlah Izin Usaha Perdagangan (Pasar rakyat, Pusat perbelanjaan, waralaba, Tanda Daftar Gudang, Surat Keterangan Asal)	6	34.007.630	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Jumlah Izin Usaha Perdagangan (Pasar rakyat, Pusat perbelanjaan, waralaba, Tanda Daftar Gudang, Surat Keterangan Asal)	6	34.007.630	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pesisir Selatan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha erintegrasi Secara Elektronik	4	-	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pesisir Selatan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha erintegrasi Secara Elektronik	4	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Pesisir Selatan	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	1	34.007.630	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Pesisir Selatan	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	1	34.007.630	
	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah pemantauan dan pengawasan terhadap distribusi produk dan bahan beresiko dan berbahaya	5	-	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah pemantauan dan pengawasan terhadap distribusi produk dan bahan beresiko dan berbahaya	5	-	
	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Pesisir Selatan	Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	12	-	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Pesisir Selatan	Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	12	-	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIN yang ditetapkan dalam RPIK	30	12.670.709.155	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIN yang ditetapkan dalam RPIK	30	12.438.979.155	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota		Pertambahan jumlah Industri Kecil dan Menengah	9	12.670.709.155	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota		Pertambahan jumlah Industri Kecil dan Menengah	9	12.438.979.155	
			Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri	21321				Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri	21321		
			Jumlah Sentra IKM	3				Jumlah Sentra IKM	3		
			Jumlah Produk yang bersertifikat (Halal, TKDN, MD-BPOM, HCCP/ CPPOB, HKI, SNI) (produk)	25				Jumlah Produk yang bersertifikat (Halal, TKDN, MD-BPOM, HCCP/ CPPOB, HKI, SNI) (produk)	25		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	5	232.650.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	5	162.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	4	250.000.156	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	4	250.000.156	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	12.188.058.999	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	12.026.978.999	
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA		Persentase Pelaku IKM yang memperoleh Izin sesuai ketentuan (IUI/ NIB)	15,2	-	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA		Persentase Pelaku IKM yang memperoleh Izin sesuai ketentuan (IUI/ NIB)	15,2	-	
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Persentase hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	-	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Persentase hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	0	-	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	0	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/ Kota Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	0	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/ Kota Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	0	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIN yang ditetapkan dalam RPIK	30	26.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIN yang ditetapkan dalam RPIK	30	26.000.000	
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota		Tersedianya Informasi Industri secara lengkap dan terkini	100	26.000.000	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota		Tersedianya Informasi Industri secara lengkap dan terkini	100	26.000.000	
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	15	26.000.000	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	15	26.000.000	
	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/ Kota	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/ Kota Melalui SIINas	1	-	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/ Kota	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/ Kota Melalui SIINas	1	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Jumlah lembaga ekonomi dan sosial di kawasan transmigrasi	50	89.999.888	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Jumlah lembaga ekonomi dan sosial di kawasan transmigrasi	50	89.999.888	
			Jumlah sarana dan prasarana ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di kawasan transmigrasi	45				Jumlah sarana dan prasarana ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di kawasan transmigrasi	45		
	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	4	89.999.888	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	4	89.999.888	
			Jumlah satuan pemukiman yang dibina	2				Jumlah satuan pemukiman yang dibina	2		
	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Lunang, Silaut	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	20	-	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Lunang, Silaut	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	20	-	
	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Lunang, Silaut	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1	89.999.888	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Lunang, Silaut	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1	89.999.888	
	Total				19.010.940.960	Total				18.779.210.960	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Pembangunan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mengacu pada dokumen Renstra Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yang memuat sebagai berikut :

- a. Penekanan Sasaran Jangka menengah Renstra Kementrian Perdagangan Republik Indonesia tahun 2020 - 2024 yang terkait dengan Kabupaten Pesisir Selatan antara lain:
 1. Terjaganya stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting
 2. Meningkatnya Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha yang Bertanggungjawab
 3. Meningkatnya Pemahaman Masyarakat di Bidang Kemetrologian
 4. Meningkatnya Kinerja Daerah di Bidang Kemetrologian
 5. Meningkatnya Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Bidang Perlindungan Konsumen
 6. Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
 7. Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Pelaku Usaha dan Sarana Perdagangan

- b. Penekanan Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Perindustrian Republik Indonesia tahun 2020 – 2024 yang terkait dengan Kabupaten Pesisir Selatan antara lain:
 - 1. Meningkatnya kemampuan industri dalam negeri
 - 2. Tersedianya regulasi pembangunan industri yang efektif
 - 3. Terwujudnya sistem informasi industri yang berkualitas
- c. Penekanan Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia tahun 2020 – 2024 yang terkait dengan Kabupaten Pesisir Selatan antara lain:
 - 1. Meningkatnya status perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi
 - 2. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan yang berbasis pada ilmu pengetahuan, inovasi, serta data dan informasi dalam keterpaduan rencana untuk meningkatkan daya saing pembangunan desa, perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi.
 - 3. Meningkatnya kapasitas SDM desa dan perdesaan daerah tertinggal dan transmigrasi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Transmigrasi tahun 2021-2026 dan Rasionalisasi Renstra Dinas Perdagangan dan Transmigrasi hasil revidi RPJMD tahun 2022. Kesesuaian indikator tujuan dan sasaran pada Renstra dengan rencana prioritas

yang akan dicapai pada tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan dan Transmigrasi tahun 2024.

a. Tujuan.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi pada jangka waktu 5 (lima) tahun seperti yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2021-2026. Tujuan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026.

Adapun tujuan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi adalah :

1. Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja
2. Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi
3. Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin
4. Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat terukur.

Adapun Sasaran Dinas Perdagangan dan Transmigrasi adalah :

1. Terwujudnya Pemerintahan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi yang akuntabel dan berkinerja
2. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah
3. Meningkatnya kemandirian Kawasan Transmigrasi

4. Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan (Industri dan Perdagangan)

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas. Menentukan skala prioritas didasarkan pada urutan kegiatan yang bersifat rutin/ mengikat, karakteristik OPD dan prioritas daerah, guna mewujudkan efektivitas Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencana Program dan Kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Pesisir Selatan

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Perubahan)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11
					DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI				18.779.210.960,00				
	3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				18.779.210.960,00				
	3	30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				6.224.231.917,00				
1	3	30	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kelengkapan Pelaporan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Ketepatan waktu pelaporan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kategori keterbukaan informasi publik Persentase Kinerja Bidang yang tercapai Jumlah Inovasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi		100 0 95 91%-100 3 % Delay laporan undefined % Inovasi	4.654.993.532,00				

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	30	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi		20 Dokumen	33.684.200,00				
	3	30	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	4 Dokumen	18.336.000,00	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)			
	3	30	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16 Laporan	15.348.200,00	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)			
	3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang dilaporkan		12 Dokumen	3.796.769.694,0 0				
	3	30	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38 Orang/bu lan	3.590.278.960,0 0	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)			

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	30	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	208.890.734,00	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			
	3	30	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diinventarisasi		1503 unit	19.999.000,00				
	3	30	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD								
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	19.999.000,00	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			
	3	30	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Laporan	0,00	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			
	3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pengaduan/saran yang ditindaklanjuti Jumlah SDM yang mengikuti peningkatan kapasitas Persentase dokumen publik dan dipublish		15 Buah 5 Orang 95 %	146.205.788,00				

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	30	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	2.777.720,00	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			
	3	30	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	0 Paket	0,00	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			
	3	30	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	0 Paket	0,00	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			
	3	30	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Paket	17.414.124,00	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			
	3	30	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Paket	9.999.944,00	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	30	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	0 Dokumen	0,00	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			
	3	30	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	0,00	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			
	3	30	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70 Laporan	114.007.600,00	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			
	3	30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik		90 %	28.857.114,00				
	3	30	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	28.857.114,00	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jumlah pelayanan umum yang terselenggara dengan baik pada Dinas Perdagangan dan Transmigrasi		95 %	486.941.155,00				
	3	30	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	350.333.135,00	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			
	3	30	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Semua Kel/Desa	12 Laporan	102.062.421,00	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			
	3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik		90 %	188.688.580,00				
	3	30	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	1 Unit	61.690.000,00	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	30	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	40.048.580,00	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			
	3	30	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Unit	2.950.000,00	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			
	3	30	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	72.000.000,00	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			
	3	30	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	0 Unit	0,00	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			
2	3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (pasar rakyat, toko swalayan, waralaba)		60 %	34.007.630,00				

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah izin usaha perdagangan		6 Izin	34.007.630,00				
	3	30	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik								
							Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	0,00	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			
	3	30	02	2.01	0002	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik								
							Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 laporan	34.007.630,00	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	30	02	2.06		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-		-	0,00				
	3	30	02	2.06	0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)								
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Laporan	0,00	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			
3	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah pasar rakyat menuju kriteria SNI		1 Pasar	1.220.675.048,00				
	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar rakyat Jumlah pedagang di pasar rakyat		51 Pasar 935 Pedagang	349.999.844,00				
	3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan								

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	51 Unit	504.574.844,00	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			
	3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pasar rakyat Jumlah pedagang di pasar rakyat (yang menempati petak)		51 Pasar 935 Pedagang	222.600.204,00				
	3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 Dokumen	716.100.204,00	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			
4	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting		<9 %	29.499.610,00				
	3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persediaan rata rata ketersediaan stok bahan kebutuhan pokok di pasar rakyat dan bahan kebutuhan lainnya		90 %	34.999.610,00				

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota								
							Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	9.499.660,00	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			
	3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota								
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	19.999.950,00	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			
	3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-		-	0,00				
	3	30	04	2.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi								
							Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Laporan	0,00	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			
5	3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	-		-	0,00				

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	0,00				
	3	30	05	2.01	0002	Pameran Dagang Nasional								
							Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Pelaku Usaha	0,00	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			
	3	30	05	2.01	0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor								
							Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Produk	0,00	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			
6	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah pasar rakyat menuju kriteria SNI		1 Pasar	285.056.097,00				
	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTIP) bertanda tera sah yang berlaku		0,5 %	285.056.097,00				

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang								
							Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400 Unit	285.056.097,00	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			
	3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal								
							Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Orang	0,00	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			
7	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	-		-	0,00				
	3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-		-	0,00				
	3	30	07	2.01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota								
							Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 UMKM	0,00	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	30	07	2.01	0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota								
							Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 UMKM	0,00	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				12.464.979.155,00				
8	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIN yang ditetapkan dalam RPIK		30 %	12.438.979.155,00				
	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Produk yang bersertifikat (Halal, TKDN, MD-BPOM, HCCP/ CPPOB, HKI, SNI) (produk) Jumlah Sentra IKM Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pertambahan jumlah Industri Kecil dan Menengah		21321 Pelaku IKM 25 Produk 3 Sentra IKM 9 %	12.389.402.156,00				
	3	31	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri								
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	162.000.000,00	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			
	3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri								
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	250.000.156,00	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			
	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12.026.978.999,00	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			
	3	31	02	2.01	0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri								
							Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	0,00	-			

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	31	02	2.01	0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/ Kota								
							Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	0,00	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)			
9	3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	-		-	0,00				
	3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota	-		-	0,00				

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	31	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota								
							Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	0,00	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			
	3	31	03	2.01	0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)								
							Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	0,00	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIN yang ditetapkan dalam RPIK		30 %	26.000.000,00				
	3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Informasi Industri secara lengkap dan terkini		100 %	32.000.000,00				
	3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)								
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Dokumen	26.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
	3	31	04	2.01	0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas								
							Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
	3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				89.999.888,00				

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 1	3	32	02			PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-		-	0,00				
	3	32	02	2.01		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	-		-	0,00				
	3	32	02	2.01	0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi								
							Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	Kab. Pesisir Selatan, Lunang, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Silaut, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
	3	32	02	2.01	0002	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan								
							Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Lunang, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Silaut, Semua Kel/Desa	1 Kawasan Transmigrasi	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	32	02	2.01	0003	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi								
							Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Hektar	0,00	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			
1 2	3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah lembaga ekonomi dan sosial di kawasan transmigrasi Jumlah sarana dan prasarana ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di kawasan transmigrasi		48 20 Lembaga Unit	89.999.888,00				
	3	32	04	2.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun Jumlah satuan pemukiman yang dibina		2 Pemukiman 4 Unit	89.999.888,00				
	3	32	04	2.01	0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman								
							Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Lunang, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Silaut, Semua Kel/Desa	10 Kepala Keluarga	0,00	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			
	3	32	04	2.01	0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman								

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Lunang, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Silaut, Semua Kel/Desa	1 Satuan Permukiman	89.999.888,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
	J U M L A H									18.779.210.960,00				

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Program Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi. Rencana program prioritas beserta indikator outcome/program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya

akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN). Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif Renja Perubahan tahun 2024 Dinas Perdagangan dan Transmigrasi terdapat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Rencana Program/Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Tahun 2025
Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pagu RAPBD Perubahan 2024 (Banggar)
1	2		3
I	SEKRETARIAT		4.654.993.532
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		4.654.993.532
	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.799.169.694
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.590.278.960
	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	208.890.734
	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	144.199.388
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.777.720
	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.414.124
	3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.999.944
	4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114.007.600
	3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28.857.114
	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.857.114
	4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	452.395.556
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	350.333.135
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	102.062.421
	5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	176.688.580
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	61.690.000
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.048.580
	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.950.000
	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	72.000.000
	6	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	33.684.200
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.348.200

1	2		3
	2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.336.000
	7	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19.999.000
	1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	19.999.000
	BIDANG PERDAGANGAN		1.569.238.385
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		1.220.675.048
	1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	504.574.844
	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	504.574.844
	2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	716.100.204
	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	716.100.204
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		29.499.610
	1	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	29.499.610
	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	9.499.660
	2	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	19.999.950
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		34.007.630
	1	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Izin Usaha Toko Swalayan	34.007.630
	1	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	34.007.630
	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		285.056.097
	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	285.056.097
	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	285.056.097
	BIDANG PERINDUSTRIAN		12.464.979.155
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		12.438.979.155
	1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	12.438.979.155
	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	162.000.000
	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	250.000.156
	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	12.026.978.999
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		26.000.000
	1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	26.000.000
	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	26.000.000
IV	BIDANG TRANSMIGRASI		89.999.888
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		89.999.888
	1	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	89.999.888
	1	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	89.999.888
Total			18.779.210.960

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2024. Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan pada pertengahan tahun 2024.

Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan *feed back* terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

Demikian Dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2024 ini disusun, dan disadari masih banyak kelemahan dan kekurangan-kekurangan, kami berharap adanya kritik dan saran yang membangun demi peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat.

